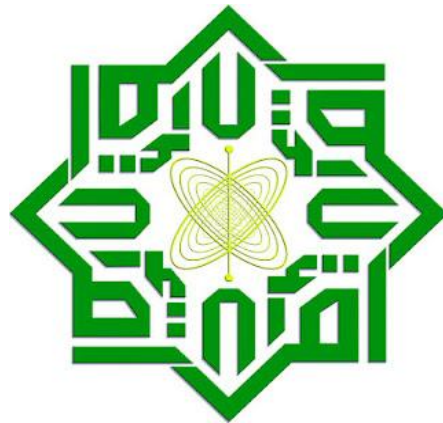


**PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive Sarjana Lengkap
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*



Disusun Oleh:

YUNIWATI DWI SAPUTRI

NIM. 108 7300 1611

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2012

ABSTRAKSI

PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)

Oleh : Yuniwati Dwi Saputri

Dalam pelaksanaan Self Assessment System memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan aparat pajak diberi peran untuk mengawasi pelaksanaannya. Sistem ini di satu sisi bernilai positif, yaitu mencerdaskan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang secara mandiri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, dalam praktek Self Assessment System terdapat banyak kendala salah satunya adalah kepatuhan para wajib pajak yang negatif sehingga dapat menghambat penerimaan pajak.

Data penelitian ini menggunakan kuisioner, dalam teknik pengumpulan data menggunakan skala likert, 5 point yang dimulai dari “sangat tidak setuju” (skala 1) sampai “sangat setuju” (skala 5). Sampel yang diambil adalah 400 responden wajib pajak orang pribadi berdasarkan rumus slovin, dan yang dapat diproses adalah 400 responden wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Untuk menguji hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh penerapan dari dimensi-dimensi Self Assessment System terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F tabel sebesar $2,395 < F$ hitung $10,232$ dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,000$ berada dibawah $0,05$. Maka model regresi menunjukkan dimensi dari Self Assessment secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu dari analisis determinasi, variasi variabel independen yang digunakan dalam model (mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri pajak terutang, membayar pajak terutang, melaporkan SPT) mampu menjelaskan sebesar $79,4\%$ variasi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sedangkan sisanya sebesar $20,6\%$ dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Keyword: Penerapan Self Assessment System, Kepatuhan WPOP

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setinggi puji sedalam syukur disertai Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan rahmat, nikmat kesehatan, hidayah, dan kesempatan dari Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karna atas perjuangan dan pengorbanan beliau kita dapat hidup di zaman yang berintelektualitas dan dalam masa modrenisasi Islam yang maju seperti di kampus madani UIN SUSKA RIAU Pekanbaru.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima masukan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda **“Djaswal”** dan Ibunda **“Ernawati”**. Terima kasih untuk semua kasih sayang,

cinta, do'a, pengorbanan, motivasi dan dukungan materil yang telah diberikan. Semua yang papa dan mama berikan tidak akan mungkin bisa ananda balas. Dan akan selalu ananda kenang sepanjang masa.

2. Bapak **Prof. Dr. H. M. Nazir** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Pekanbaru.
3. Bapak **Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Pekanbaru.
4. Bapak **Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Pekanbaru.
5. Ibu **Desrir Miftah, SE, MM, Ak** selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan nasehatnya untuk selalu giat dalam belajar.
6. Bapak **Khairil Henry, SE, M.Si, Ak** selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu, untuk memberikan ide, saran serta nasehat agar selalu gigih dalam hal apapun termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang selalu memberikan ilmu dan nasehatnya selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Staf Perpustakaan Fekonsos yang telah banyak membantu penulis dalam menyiapkan surat-surat dan peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak **Mariyaldi, SE** selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang telah memberikan masukan, saran serta nasehat yang sangat berguna selama kerja praktek (magang) yang penulis laksanakan.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan **Lya, Reni, Nopa, Fauzan, Afri, Satria**, dan **Agung** serta teman-teman di akuntansi lokal A, konsentrasi Perpajakan, dan konsentrasi lainnya. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya, perjalanan selama empat tahun tidak akan dapat penulis lupakan.
11. Sahabat sepermainan sejak kecil **Aisyah, Yaya, Bang Jonnes**, dan Keponakanku tersayang **Muhammad Dzikran Faqih**. Terimakasih atas dukungan, do'a dan senyum yang selalu diberikan.
12. **Frendy Mandala** yang telah banyak memberikan bantuan. Terimakasih untuk waktunya, semangat, perhatian, dan doronganmu yang telah membuka jendela kehidupan bagi penulis tentang arti perjuangan tanpa mengeluh.

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon, sehingga segala usaha dan jasa semua pihak dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga pembaca dapat memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga ada manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Juni 2012

Penulis

YUNIWATI DWI SAPUTRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	10
2.1 Definisi Pajak	10
2.2 Fungsi Pajak	12
2.3 Jenis Pajak.....	12
2.4 Asas-asas Pemungutan Pajak	13
2.5 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.6 Definisi <i>Self Assessment System</i>	15
2.7 Definisi Wajib Pajak	17
2.8 Kewajiban WP dalam <i>Self Assessment System</i>	19
2.9 Hak Wajib Pajak	21

2.10 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	23
2.11 Definisi Kepatuhan WP.....	25
2.12 Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam	26
2.13 Model Penelitian	33
2.14 Hipotesa	34
2.15 Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Desain Penelitian.....	36
3.2 Populasi Dan Sampel	36
3.3 Jenis Dan Sumber Data Dan Metode Penelitian	37
3.4 Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	38
3.4.1 Variabel Independen (X1).....	38
3.4.2 Variabel Independen (X2).....	38
3.4.3 Variabel Independen (X3).....	39
3.4.4 Variabel Independen (X4).....	39
3.4.5 Variabel Dependen (Y)	40
3.4.6 Pengukuran Variabel.....	40
3.5 Analisis Deskriptif	41
3.6 Pengujian Validitas Dan Reliabilitas	41
3.6.1 Uji Validitas	41
3.6.2 Uji Reliabilitas	42
3.7 Uji Normalitas.....	42

3.8 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.8.1 Uji Multikolinearitas	43
3.8.2 Uji Autokorelasi	43
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas	44
3.9 Uji Hipotesis	44
3.9.1 Uji F	45
3.9.2 Uji t	45
3.10 Koefisien Determinasi.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi dan Analisis Data	48
4.2 Pengolahan Data.....	50
4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Usia.....	51
4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Status	51
4.2.4 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan ..	52
4.2.5 Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	53
4.3 Analisis Data.....	54
4.3.1 Uji Validitas Data.....	54
4.3.2 Uji Realibilitas	57
4.3.3 Uji Normalitas	58
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	60
4.4.1 Uji Multikolinearitas.....	60

	4.4.2 Uji Autokorelasi.....	61
	4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	61
	4.5 Uji Hipotesis	62
	4.5.1 Hasil Uji Secara Simultan (F).....	64
	4.5.2 Hasil Uji Secara Parsial (t)	65
	4.6 Koefisien Determinasi.....	69
BAB V	PENUTUP	70
	5.1 Kesimpulan	71
	5.2 Keterbatasan	72
	5.3 Saran.....	72
 DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
III.1 Uji Durbin Watson (Uji DW).....	44
IV.1 Tingkat Pengumpulan Kuesioner.....	48
IV.2 Statistik Deskriptif.....	49
IV.3 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
IV.4 Profil Responden Berdasarkan Usia.....	51
IV.5 Profil Responden Berdasarkan Status.....	52
IV.6 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan.....	52
IV.7 Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	53
IV.8 Hasil Uji Validitas.....	55
IV.9 Hasil Uji Reliabilitas Data.....	57
IV.10 Hasil Uji Normalitas Data.....	59
IV.11 Nilai <i>Tolerance</i> da VIF.....	60
IV.12 Uji Autokorelasi.....	61
IV.13 Hasil Regresi Berganda.....	63
IV.14 Hasil Uji F Hitung.....	64
IV.15 Hasil Analisis Determinasi.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Oleh karenanya, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku Wajib Pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang

(dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran).

Perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif yaitu sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Karena untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan kekayaan alam, hasil usaha BUMN, barang-barang yang dikuasai pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran).

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Menurut James yang dikutip oleh

Gunadi (2005:4) menyatakan bahwa: “Besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*)”. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Misal jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh.

Sejalan dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak (dari *official assessment* menjadi *self assessment system*), dimana dalam hal ini Wajib Pajak lah yang harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) nya.

Sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak terutang meliputi (1) *self assessment system* (wajib pajak menghitung sendiri pajaknya), (2) *official assessment* (wajib pajak menyampaikan informasi objek pajaknya, kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak), (3) *hybrid system* (campuran antara *self* dan *official assessment* dengan berbagai kombinasinya). Informasi keuangan yang dihasilkan proses pembukuan diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan vertiksi, serta pemeriksaan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak itu.

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip *self assesment system*, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya yang sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Fungsi Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya.

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak, karena penerimaan dari migas tidak dapat diandalkan lagi, sementara sumber dana dalam negeri hanya sebagai pelengkap.

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan.

Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak, kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bisa dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setelah terdaftar menjadi wajib pajak, kewajiban selanjutnya yaitu menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

Kemudian wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

Apabila pembayaran telah dilakukan, wajib pajak harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang merupakan suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Seiring dengan terjadinya kasus Gayus Tambunan yang merupakan seorang aparat pajak (fiskus) yang telah melanggar kode etik sebagai seorang pegawai di kantor pelayanan pajak, beliau tidak diperbolehkan menjadi konsultan pajak untuk suatu perusahaan, namun beliau tergiur dengan penghasilan dari penyelewengan pelaporan SPT suatu perusahaan. Karena kepatuhan negatif dari wajib pajak yang menawarkan kerjasama dengan upah yang besar kepada Gayus, beliau menjadi tersangka mafia perpajakan. Di kota Pekanbaru juga terdapat kejadian yang serupa seperti kasus Gayus Tambunan. Masih banyak terjadi kepatuhan yang negatif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada setiap pelaporan SPT Tahunan, para wajib pajak memanfaatkan tenaga fiskus dalam pelaporan SPT dan penyelewengan pajak. Fenomena inilah yang menarik perhatian penulis dalam melakukan penelitian ini dengan judul : **“PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran mendaftarkan diri secara mandiri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhannya ?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghitung pajak terutang terhadap kepatuhannya ?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran pembayaran pajak terutang yang dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhannya ?
4. Bagaimana pengaruh Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT-nya terhadap kepatuhannya ?
5. Bagaimana pengaruh mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran mendaftarkan diri secara mandiri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhannya.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghitung pajak terutang terhadap kepatuhannya.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pembayaran pajak terutang yang dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhannya.

4. Untuk mengetahui pengaruh Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT-nya terhadap kepatuhannya.
5. Untuk mengetahui apakah mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi wajib pajak orang pribadi untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

2. Manfaat Bagi Akademis

Dalam penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pengalaman baru, pengetahuan, serta aplikasi langsung di dalam memahami materi pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulis nantinya akan mengembangkan penelitian ini menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi pembahasan pada penelitian ini, yang berhubungan dengan judul penelitian, hipotesa, dan variabel penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai statistik deskriptif, hasil uji validitas dan reliabilitas, analisis data penelitian, analisis asumsi klasik, analisis hasil penelitian, pengolahan data serta pengujian hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup dalam bagian ini disajikan kesimpulan hasil-hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti pada topik yang dimasa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Sejak jaman dahulu sebelum perkembangan masyarakat seperti sekarang ini, telah dikenal adanya pemungutan pajak. Dimana dalam masyarakat yang sangat sederhana tersebut, penyelenggaraan kepentingan bersama diurus dan diatur oleh orang yang sangat dituakan dalam masyarakat disebut kepala kelompok/suku/marga. Dalam pembiayaan penyelenggaraan kepentingan bersama anggota kelompok memberikan sebagian waktu, tenaga, dan sebagian harta miliknya kepada ketua kelompok. Pemberian dalam bentuk natura ini dapat dianggap sebagai pajak dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian kelompok masyarakat tersebut semakin berkembang semakin besar yang diikuti pula dengan semakin berkembangnya kepentingan dari masyarakat. Sehingga peranan kepentingan bersama semakin kompleks dan memerlukan suatu organisasi besar yang dikenal dengan Negara pada saat ini. Pemberian dalam bentuk natura tersebut kemudian berubah menjadi dalam bentuk uang karena dianggap lebih fleksibel dan berfungsi sebagai pembayaran pajak.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Karena pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak juga didefinisikan sebagai iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak juga dikatakan sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam Waluyo (2010:1) menyatakan: *“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang berlangsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”*.

Dari definisi di atas terlihat ada beberapa hal pokok yang bisa disimpulkan, yaitu :

1. Pajak dipungut dari rakyat untuk membiayai program pemerintah.
2. Pajak dipungut secara paksa (*compulsory*), bukan secara sukarela (*voluntary*).
3. Tidak mendapatkan kontraprestasi, jadi rakyat yang membayar pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Manfaat yang diterima

masyarakat adalah berupa pelayanan yang diberikan pemerintah secara umum ataupun menikmati hasil pembangunan yang dilakukan Pemerintah.

2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur) dalam Siti Resmi (2007: 3), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3 Jenis Pajak

Dalam Siti Resmi (2007: 7), di Indonesia pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

- b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik pada berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam Waluyo (2010:13) terdapat empat asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu: *Equality*, *Certainty*, *Convenience*, dan *Economy*.

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Siti Resmi (2007:11) dikemukakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.6 Definisi *Self Assessment System*

Self Assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi, wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Anastasia Diana (2009: 1) “*Self Assessment System adalah sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar*”.

Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana, penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut Rinsky K. Judisseno selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2010:102), menjelaskan bahwa :

“*Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan”.

Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan.

Adapun ciri *self assessment system*, antara lain :

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban

perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.7 Definisi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan **Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT**

Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif.

Menurut Waluyo (2010:23) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Sedangkan pengertian wajib pajak orang pribadi menurut Siti Resmi (2009:21) adalah orang pribadi yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk diberikan NPWP dapat dibedakan menjadi seperti ini :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi menjalankan Pekerjaan Bebas
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memerlukan NPWP

2. Wajib Pajak Badan

Menurut Waluyo (2010:23) wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi : perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

2.8 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) menjelaskan bahwa :

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui NPWP yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

a. Membayar Pajak

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26).
- 3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- 4) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

c. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan SPT dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.9 Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh :

1. Pengangsuran Pembayaran, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.
2. Pengurangan PPH Pasal 25, apabila Wajib pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak.

4. Pembebasan Pajak, apabila Wajib Pajak mengalami musibah dikarenakan *force majeure* seperti bencana alam. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak akan mengeluarkan suatu kebijakan.
5. Pajak ditanggung Pemerintah, dalam rangka proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi.
7. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan, apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
8. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila Wajib Pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
9. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke Direktorat Jendral Pajak. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak merasa kurang/ tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

10. Banding, apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
11. Peninjauan Kembali, apabila Wajib Pajak tidak/ belum puas dengan keputusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

2.10 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:48) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan jg perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

1) *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu

diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.

4) *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

2.11 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa :

Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Nurmantu seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:48) menjelaskan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

2.12 Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah:177; Al-An'am:141; Al-Isra':26; An-Nisa':36, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya

dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.

❖ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah : 177)

❖ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang

bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Al-An’am : 141)

﴿٢٦﴾ وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Al-Isra’: 26)

﴿٣٦﴾ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَلًا فَاخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (An-Nisa’:36)

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (Nurkholis,2010) :

- a. Penerimaan hal-hal pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subyeknya adalah juga non-muslim.

Selain itu, Negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder, yaitu dari denda-denda (kafarat), hibah, hadiah, dan lain-lain yang diterima secara tidak tetap.

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk

mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah Swt
- b. Obyeknya harta
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi

pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).

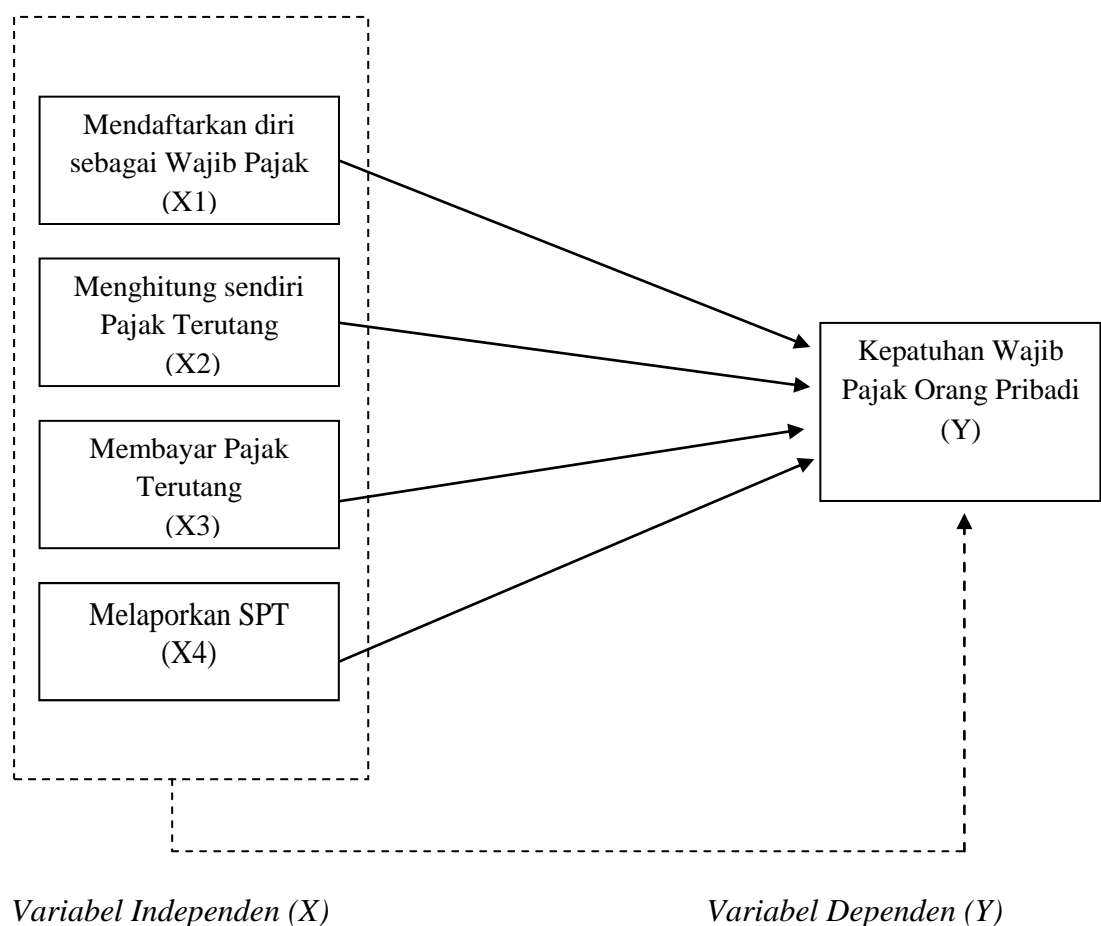
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai saat ini, penghasilan yang di dapat dari usaha

maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

2.13 Model Penelitian

Gambar II.1- Model Penelitian



Keterangan : —→ Hubungan Parsial

---→ Hubungan Simultan

2.14 Hipotesa

Berdasarkan empat dimensi dari *Self Assessment System* tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. H1 : Terdapat pengaruh secara signifikan kesadaran dalam mendaftarkan diri secara mandiri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhannya.
2. H2 : Terdapat pengaruh secara signifikan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghitung pajak terutang terhadap kepatuhannya.
3. H3 : Terdapat pengaruh secara signifikan kesadaran pembayaran pajak terutang yang dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhannya.
4. H4 : Terdapat pengaruh secara signifikan Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT-nya terhadap kepatuhannya.
5. H5 : Terdapat pengaruh secara signifikan mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.15 Penelitian Terdahulu

1. Fungsi Menghitung dan Fungsi Membayar

Damayanti (2004) menyebutkan bahwa adanya anggapan yang kurang baik oleh Wajib Pajak terhadap *Fiskus* sehingga mengakibatkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak terhadap pelaksanaan *self assessment* sulit dicapai. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya Wajib Pajak Badan di Salatiga yang belum mampu menghitung sendiri pajak

terutangnya. Sedangkan fungsi pembayaran pajak terutang sebagian besar telah dilaksanakan tepat waktu. Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak tepat waktu ternyata fungsi penghitungan pajak terutang dilakukan oleh *Fiskus*.

2. Fungsi Melapor

Penelitian Novianti (1997) dalam Indra Kusumawati (2005) menyimpulkan bahwa pelaksanaan *self assessment* belum bisa diterapkan oleh Wajib pajak Orang Pribadi terutama pemilik kos-kosan, karena mereka sering kali tidak melaporkan atau mencantumkan Pajak Penghasilannya di SPT. Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak pemilik rumah kos-kosan karena rendahnya tingkat kejujuran Wajib Pajak dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu ingin menguji pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Pekanbaru Senapelan. Sifat dari penelitian ini dikategorikan penelitian penjelasan, dimana menjelaskan pengaruh melalui pengujian hipotesis.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang kita tetapkan dalam penelitian yang kita rancang. Puraji Setyosari (2010:144) mengartikan populasi bisa diartikan sebagai sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dan statusnya masih aktif. Selama tahun 2011 hingga Januari 2012 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebanyak 57.327 orang.

Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan sampling yang digunakan adalah quato sampling. Penentuan jumlah sampling yang di ambil menggunakan rumus slovin (Husein Umar : 2008) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{57.327}{1 + 57.327 (5\%)^2}$$

$$n = \frac{57.327}{144,3175}$$

$$n = 397,22$$

$$n = 400$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Standar error atau persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan nilai $e = 5\%$. Maka sampel yang diperlukan adalah 400 wajib pajak orang pribadi untuk mewakili jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang berjumlah 57.327 orang. Teknik pengambilan sampel ini juga pernah dilakukan oleh Rachys (2011) dan Meryzha (2011) dengan menggunakan standar error 5% sehingga mendapatkan sampel yang berjumlah 400 orang.

3.3 Jenis dan Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dimana data utama yang di pakai untuk menjawab masalah yang diteliti yaitu data mengenai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dimana data ini diperoleh langsung dari sumbernya langsung dan tidak melalui perantara apapun.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Kuesioner

Merupakan cara perolehan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi, tujuan pembuatan kuesioner ini untuk memperoleh data yang relevan dari responden.

2) Observasi

Meliputi penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diperbandingkan dengan teori yang dikemukakan agar dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Independen (X1)

Untuk mengukur kesadaran masyarakat mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari pajak yang dibayar yang berguna untuk kelangsungan pembangunan bangsa dan negara, hak dan kewajibannya perpajakan, manfaat NPWP, dan mengetahui sanksi dalam perpajakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan 3 pertanyaan yang ada pada penelitian Widayati (2010).

3.4.2 Variabel Independen (X2)

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Variabel ini diukur

dengan menggunakan 4 pertanyaan yang ada pada penelitian Widayati (2010).

3.4.3 Variabel Independen (X3)

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*). Kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak terutangnya dicerminkan dari ketepatan waktu pembayaran, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan yang ada pada penelitian Widayati (2010).

3.4.4 Variabel Independen (X4)

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan dan bertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT dicerminkan dari ketepatan waktu pelaporan, pengetahuan tentang kelengkapan dokumen SPT sesuai dengan jenis pekerjaan dan jumlah penghasilannya, mengetahui sanksi

apabila terlambat melaporkan SPT. Variabel ini diukur dengan menggunakan 6 pertanyaan yang ada pada penelitian Widayati (2010).

3.4.5 Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa :

Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Variabel ini diukur dengan menggunakan 4 pertanyaan yang ada pada penelitian Widayati (2010).

3.4.6 Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran dengan skala likert ataupun interval, dan dibuat dalam bentuk *checklist*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009). Adapun nilai kuantitatif yang dikomposisikan digunakan dengan menggunakan skala likert dan untuk suatu pilihan nilai (skor) dengan jarak interval. Skor dari pilihan tersebut antara lain, sangat setuju (SS) dengan 5 poin, setuju (S) dengan 4

poin, netral (N) dengan 3 poin, tidak setuju (TS) dengan 2 poin, sangat tidak setuju (STS) dengan 1 poin.

3.5 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian bertujuan untuk memberi gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2006).

3.6 Pengujian Validitas Dan Reliabilitas

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner (Ghozali, 2006).

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap item-item pertanyaan dengan total nilai setiap variabel. Korelasi setiap item pertanyaan dengan nilai total setiap variabel dilakukan dengan teknik korelasi yaitu korelasi produk momen person (bivariate pearson) untuk mengetahui apakah variabel yang diuji valid atau tidak, hasil korelasi dibandingkan dengan angka kriteria r table korelasi dan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan diambil jika nilai hasil uji validitas lebih besar dari angka kriteria r table korelasi, maka item pertanyaan tersebut dikatakan valid. Untuk menentukan tingkat validitas peneliti menggunakan bantuan program *statistical product and service solution* (SPSS) versi 17,0.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006).

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode one shot atau diukur sekali saja. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran yang hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain. Untuk pengukuran reliabilitas, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach alpha* (α) > 60%. Hal ini diungkapkan oleh Nunally (1967) dalam Priyatno (2008).

3.7 Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah uji untuk melihat apakah distribusi residual mengikuti pola distribusi normal atau tidak, atau menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Jika data berdistribusi normal maka uji statistik parametrik yang akan digunakan dan jika data berdistribusi tidak normal maka uji non parametrik yang akan digunakan.

Pengujian normalitas dapat digunakan dengan menggunakan one sample kolmogorov smirnov test dengan melihat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah melihat probability asymp. Sig (2-tailed), jika probabilitas asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$ maka data mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika $< 0,05$ maka data mempunyai distribusi yang tidak normal.

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Menurut Santoso dalam Dwi (2009) pada umumnya jika *varians inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai *tolerance* $< 0,10$ maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

3.8.2 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson. Menurut Ghazali (2006) Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel III.1 Uji Durbin-Watson (Uji DW)

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi negatif atau positif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Duwi Priyatno, 2008). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat scatterplots. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

3.9 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel yang diteliti, maka teknik pengujian hipotesa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda (*multiple regression linear*) yaitu hubungan secara linear antara dua

atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Adapun rumus regresi linear berganda dengan bentuk interaksi keseluruhan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan : Y = Kepatuhan, b_1, b_2, b_3, b_4 dst, X = Koefisien regresi, X_1 = Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, X_2 = Menghitung pajak terutang, X_3 = Membayar pajak terutang, X_4 = Melaporkan SPT, a = Konstan, dan e = Standar error

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji F dan uji t dalam pengujian hipotesis yaitu :

3.9.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji F sering disebut dengan uji koefisien regresi secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali : 2006)

3.9.2 Uji Parsial (Uji t)

Setelah diketahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama – sama, selanjutnya semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan statistik uji t.

Pengujian tersebut dilakukan dengan dua arah (2 tailed) dengan tingkat keyakinan 95% dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Tingkat signifikannya ditentukan sebesar 5% dan *degree of freedom* (df) = n-k-1

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, dengan kata lain bahwa variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Demikian juga sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o diterima dan H_a ditolak.

3.10 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) adalah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase itu menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) dapat dicari dengan formulasi :

$$R^2 = \frac{\text{Sum of Square Regression}}{\text{Sum of Square Total}}$$

Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nol, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen (X) terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai

variabel dependen). Sedangkan jika koefisien mendekati satu, maka sebaliknya.

Pengolahan data penelitian ini menggunakan *multiple regression* dengan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 17.0.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Kuesioner disebarkan dengan cara mengantar langsung kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Setelah kuesioner selesai diisi oleh responden, peneliti mengambil kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dan diolah dengan menggunakan *statistical package for social science* (SPSS) versi 17,0. Penyebaran kuesioner dimulai tanggal 5 April 2012 dan tanggal pengumpulan 4 Mei 2012.

Jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 400 kuesioner. Kuesioner yang dapat dikumpulkan atau kembali yaitu sebanyak 400 kuesioner, semua kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu 400 kuesioner. Tingkat pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1 - Tingkat Pengumpulan kuesioner

KETERANGAN	TOTAL
Total Kuesioner Yang di Sebarkan	400
Total Kuesioner yang Terkumpul Kembali	400
Total Kuesioner yang Dapat Diolah	400
Persentase Pengembalian Kuesioner (400/400 x 100%)	400 %

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian menyebarkan 400 kuesioner. Kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 400 kuesioner atau 100%. Jadi, total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan adalah 400 kuesioner atau 400%.

Analisa data dilakukan terhadap 400 sampel responden yang telah memenuhi kriteria untuk dapat diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel IV.2 dibawah ini :

Tabel IV.2 - Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	400	9	20	14.89	2.685
Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak	400	6	15	10.31	2.272
Menghitung Pajak Terutang	400	9	19	13.44	2.005
Membayar Pajak Terutang	400	12	25	17.62	3.278
Melaporkan SPT	400	13	29	18.50	3.216
Valid N (listwise)	400				

Berdasarkan tabel IV.2 terlihat bahwa nilai jawaban semua responden terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata sebesar 14,89, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 10,31, menghitung pajak terutang mempunyai nilai rata-rata sebesar 13,44, membayar pajak hutang mempunyai nilai rata-rata sebesar 17,62, dan melaporkan SPT mempunyai nilai rata-rata sebesar 18,50.

4.2 Pengolahan Data

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 400 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

4.2.1 Profil responden berdasarkan jenis kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di Tabel IV.3 berikut ini:

Tabel IV.3 - Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	251	251%
Perempuan	149	149%
Jumlah	400	400%

Berdasarkan Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang jenis kelamin pria sebesar 251%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 149%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Laki-laki. Hal ini disebabkan responden laki-laki lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian kuesioner di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut ini:

Tabel IV.4 - Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
< 30 tahun	47	47%
30-40 tahun	202	202%
41-50 tahun	134	134%
> 50 tahun	17	17%
Jumlah	400	400%

Berdasarkan Tabel IV.4 dapat diketahui bahwa responden yang berusia < 30 tahun berjumlah 47 orang atau sebesar 47%, 30-40 tahun berjumlah 202 orang atau 202%, 41-50 tahun berjumlah 134 orang atau 134% dan yang berusia diatas 50 tahun berjumlah 17 orang atau sebesar 17%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia antar 30-40 tahun. Hal ini disebabkan karena responden yang berusia antara 30-40 tahun lebih banyak yang melakukan pelaporan pada saat penyebaran kuesioner di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Status

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan status dapat dilihat pada Tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5 - Profil Responden Berdasarkan Status

Status	Jumlah Responden	Persentase
Belum Menikah	136	136%
Menikah	264	264%
Jumlah	400	400%

Berdasarkan Tabel IV.5 dapat diketahui bahwa responden yang belum menikah berjumlah 14 orang atau sebesar 136% dan yang menikah berjumlah 264 orang atau 264%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berstatus menikah. Hal ini disebabkan karena responden yang berstatus menikah lebih banyak melakukan pelaporan pada saat penyebaran kuesioner di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

4.2.4 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendapatan perbulan dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut ini:

Tabel IV.6 - Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Pendapatan Perbulan	Jumlah Responden	Persentase
< 2 juta	13	13%
2-5 juta	259	259%
5-8 juta	96	96%
> 8 juta	32	32%
Jumlah	400	400%

Berdasarkan Tabel IV.6 dapat diketahui bahwa responden yang berpenghasilan < 2 juta berjumlah 13 orang atau sebesar 13%, 2-5 juta berjumlah 259 orang atau sebesar 259%, 5-8 juta berjumlah 96 orang

atau sebesar 96% > 8 juta berjumlah 32 orang atau sebesar 32%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berpenghasilan 2-5 juta. Hal ini disebabkan karena responden berpenghasilan diatas 2-5 juta lebih banyak yang melakukan pelaporan pada saat penyebaran kuesioner pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

4.2.5 Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel IV.7 berikut ini:

Tabel IV.7 - Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	0	0
Pegawai Negeri	244	244%
Pegawai Swasta	143	143%
Wiraswasta	13	13%
Jumlah	400	400%

Berdasarkan Tabel IV.7 dapat diketahui bahwa responden yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa berjumlah 0 dan yang bekerja sebagai pegawai negeri berjumlah 244 orang atau sebesar 244%, yang bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 143 orang atau 143% dan yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 13 orang atau 13%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini bekerja sebagai pegawai negeri Hal ini disebabkan karena responden yang bekerja sebagai pegawai negeri banyak melakukan pelaporan pada saat penyebaran kuesioner di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

4.3 Analisis data

4.3.1 Uji Validitas Data

Dalam pengujian yang peneliti lakukan untuk mengetahui kualitas data, layak atau tidaknya suatu data untuk diangkat, maka peneliti menganalisis data dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Dan dalam uji validitas yang peneliti lakukan, penulis menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan *one shot method*, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran saja. Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai *Pearson Korelation* lebih besar dari nilai *r* tabel untuk 400 responden dengan signifikansi 0,05 yaitu $df=(n-2)= 398$ yaitu sebesar 0,098. Untuk variabel independen dan dependen, dari hasil uji validitas dapat disajikan sebagai berikut :

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.8 - Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Person Correlation	Keterangan
Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,784	Valid
	X1.2	0,767	Valid
	X1.3	0,840	Valid
Menghitung Pajak Terutang (X2)	X2.1	0,589	Valid
	X2.2	0,648	Valid
	X2.3	0,520	Valid
	X2.4	0,446	Valid
Membayar Pajak Terutang (X3)	X3.1	0,704	Valid
	X3.2	0,619	Valid
	X3.3	0,711	Valid
	X3.4	0,845	Valid
	X3.5	0,747	Valid
Melaporkan SPT (X4)	X4.1	0,262	Valid
	X4.2	0,740	Valid
	X4.3	0,283	Valid
	X4.4	0,666	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X4.5	0,740	Valid
	X4.6	0,765	Valid
	Y.1	0,750	Valid
	Y.2	0,737	Valid
	Y.3	0,732	Valid
	Y.4	0,732	Valid

Dari tabel IV.8 dapat dijelaskan bahwa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diukur dengan 22 item pertanyaan yang terdiri dari :

1. Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak diukur dengan 3 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,767, artinya semua item pertanyaan diatas 0,098 dan memenuhi syarat untuk valid.
2. Menghitung Pajak Terutang diukur dengan 4 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,446, artinya semua item pertanyaan diatas 0,098 dan memenuhi syarat untuk valid.
3. Membayar Pajak Hutang diukur dengan 5 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,619, artinya semua item pertanyaan diatas 0,098 dan memenuhi syarat untuk valid.

4. Melaporkan SPT dengan 6 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,262, artinya semua item pertanyaan diatas 0,098 dan memenuhi syarat untuk valid.
5. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi diukur dengan 4 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,732, artinya semua item pertanyaan diatas 0,098 dan memenuhi syarat untuk valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* menggunakan SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0.60 Nunally (1976) dalam (Priyatno, 2008). Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel IV.9 dibawah ini :

Tabel IV.9 - Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Hasil Reliability (Alpha)		Keterangan
	Kriteria	Cronbach's alpha	
Variabel Indevenden:			
1. Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak (X1)	0.60	0,701	Reliabel
2. Menghitung Pajak Terutang (X2)	0.60	0,627	Reliabel

3. Membayar Pajak Hutang (X3)	0,60	0,776	Reliabel
4. Melaporkan SPT (X4)	0,60	0,778	Reliabel
5. Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,60	0,720	Reliabel

Sumber : Data olahan 2012

Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel IV.9 menunjukkan tidak ada koefisien *cronbach alpha* yang kurang dari 0,60. Sehingga instrument tersebut reliabel untuk digunakan.

4.3.3 Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah uji untuk melihat apakah distribusi residual mengikuti pola distribusi normal atau tidak, atau menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan.

Pengujian normalitas dapat digunakan dengan menggunakan one sample *kolmogorov smirnov test* dengan melihat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah melihat probability asymp. Sig (2-tailed), jika probabilitas asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika < 0,05 maka data mempunyai distribusi yang tidak normal.

Uji normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.10 – Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Nilai K-S-Z	Sig. (2-tailed)	Kriteria	Kesimpulan
Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	2.228	.360	0,05	Normal
Menghitung pajak terutang	3.530	.158	0,05	Normal
Membayar pajak terutang	3.063	.114	0,05	Normal
Melaporkan SPT	3.586	.575	0,05	Normal
Kepatuhan Wajib Pajak	2.780	.254	0,05	Normal

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.10 menunjukkan nilai K-S-Z untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, adalah sebesar 2,228 dengan signifikansi sebesar 0,360. Nilai K-S-Z untuk menghitung pajak terutang, adalah sebesar 3,530 dengan signifikansi sebesar 0,158. Nilai K-S-Z untuk membayar pajak hutang, adalah sebesar 3,063 dengan signifikansi sebesar 0,114. Nilai K-S-Z untuk melaporkan SPT adalah sebesar 3,586 dengan signifikansi sebesar 0,575. Nilai K-S-Z untuk kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,780 dengan signifikansi sebesar 0,254.

Apabila nilai signifikansi masing-masing variabel dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, maka nilai signifikansi K-S-Z tersebut diatas $\alpha = 0,05$, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa variabel mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, variabel menghitung pajak terutang, variabel membayar pajak hutang, variabel melaporkan SPT, dan variabel kepatuhan wajib pajak secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati besaran *varians inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Besaran VIF dan *tolerance* pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel IV.11 - Nilai *Tolerance* dan VIF

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak	0,945	1,059	Bebas Multikol
Menghitung Pajak Terutang	0,886	1,129	Bebas Multikol
Membayar Pajak Hutang	0,802	1,247	Bebas Multikol
Melaporkan SPT	0,854	1,170	Bebas Multikol

Sumber : Data olahan 2012

Dari tabel IV.11 menunjukkan variabel mendaftarkan diri sebagai wajib pajak mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,945 sedangkan nilai VIF 1,059, variabel menghitung pajak terutang mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,886 sedangkan nilai VIF 1,129, variabel membayar pajak hutang mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,802 sedangkan nilai VIF 1,247, dan variabel melaporkan SPT mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,854 sedangkan nilai VIF 1,170. Dari semua variabel independen tidak ada nilai VIF diatas 10. Berarti tidak terdapat

gangguan multikolinearitas pada penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dan layak digunakan.

4.4.2 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson. Menurut Ghazali (2006) prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

Tabel IV.12 - Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.896 ^a	.794	.785	2.569	2.014

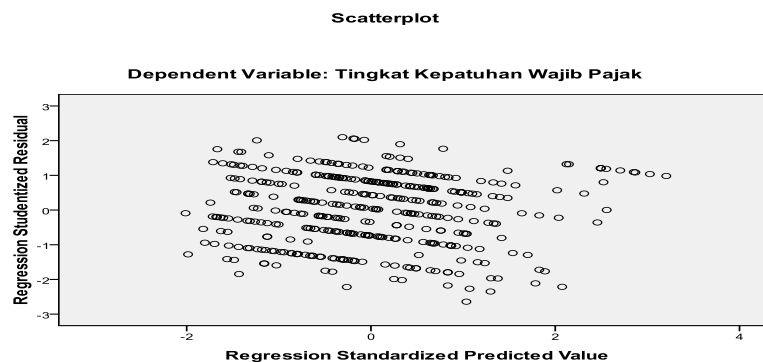
a. Predictors: (Constant), Melaporkan SPT, Menghitung Pajak Terutang, Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak, Membayar Pajak Terutang

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel tersebut dapat dilihat nilai statistik Durbin-Watson sebesar 2.014. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5 %, jumlah sampel 400 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka nilai di tabel Durbin-Watson (du) sebesar 1,810. Oleh karena $du < d < 4-du$ atau $1,810 < 2,014 < 2,19$. Hal ini membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot yaitu dengan melihat ada tidaknya pola yang terdapat pada grafik scatterplot.

Gambar IV.1 Scatterplot

Dari gambar IV.1 dapat dilihat bahwa terjadi penyebaran titik dan tidak membentuk suatu pola. Hal ini dapat diindikasikan bahwa model tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 17.0, dimana metode ini menganalisis variabel independen secara keseluruhan tanpa memilih variabel yang nantinya dijadikan satu kelompok dalam persamaan regresinya atau semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen melalui meregresikan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen terhadap mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak hutang dan melaporkan SPT sebagai variabel independen. Hasil hipotesis seperti yang tercantum dalam tabel IV.13 di bawah :

Tabel IV.13 - Hasil Regresi Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.929	1.154		7.737	.000		
	Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak	.259	.058	.220	4.456	.000	.945	1.059
	Menghitung Pajak Terutang	.024	.068	.018	2.358	.036	.886	1.129
	Membayar Pajak Terutang	.102	.044	.124	2.326	.021	.802	1.247
	Melaporkan SPT	.063	.043	.075	3.451	.038	.854	1.170

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y \text{ (Kepatuhan Wajib Pajak)} = 8,929 + 0,259X_1 + 0,024X_2 + 0,102X_3 + 0,063X_4 + e$$

1. Konstanta sebesar 8,929 menyatakan, bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 8,929.
2. Harga koefisien $b_1 = 0,259$ berarti bahwa apabila mendaftarkan diri sebagai wajib pajak mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0, 259.

3. Harga koefisien $b_2 = 0,024$ berarti bahwa apabila menghitung pajak terutang mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,024.
4. Harga koefisien $b_3 = 0,102$ berarti bahwa apabila membayar pajak terutang mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,102.
5. Harga koefisien $b_4 = 0,063$ berarti bahwa apabila melaporkan SPT mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,063.

4.5.1 Hasil Uji Secara Simultan Uji (F)

Berdasarkan uji SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV.14 - Hasil Uji F Hitung

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	270.131	4	67.533	10.232	.000 ^a
	Residual	2607.029	395	6.600		
	Total	2877.160	399			

a. Predictors: (Constant), Melaporkan SPT, Menghitung Pajak Terutang, Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak, Membayar Pajak Terutang

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F tabel sebesar $2,395 < F$ hitung $10,232$ dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,000$ berada dibawah $0,05$. Maka model regresi menunjukkan bahwa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak hutang, dan melaporkan SPT secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rambe (2009) yaitu seluruh dimensi Self Assessment System apabila dilaksanakan dengan kepatuhan sesuai ketentuan umum perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

4.5.2 Hasil Uji Secara Parsial Uji (t)

a) H_1 : Kesadaran mendaftarkan diri secara mandiri sebagai Wajib Pajak

Orang Pribadi berpengaruh terhadap kepatuhannya.

Hasil regresi menunjukkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi, yaitu : t tabel sebesar $1,966 < t$ hitung $4,456$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,000$ berada di bawah $0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Teguh Nugroho Hermawan (2010) wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebagai warga negara yang sadar pada kewajibannya, dan mengharapkan jasa timbal di kemudian hari, maka wajib pajak orang pribadi ini berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya sebagai WPOP agar memperoleh NPWP. Melalui NPWP yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

b) H₂ : Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghitung pajak terutang berpengaruh terhadap kepatuhannya.

Hasil regresi menunjukkan menghitung pajak terutang, yaitu : t tabel $1,966 < t$ hitung sebesar 2,358 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,036 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa menghitung pajak sendiri oleh wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Teguh Nugroho Hermawan (2010) menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Damayanti (2004) menyebutkan bahwa adanya anggapan yang kurang baik oleh wajib pajak terhadap *Fiskus* sehingga mengakibatkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak terhadap pelaksanaan *self assessment* sulit dicapai. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya.

c) H_3 : Kesadaran pembayaran pajak terutang yang dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap kepatuhannya.

Hasil regresi menunjukkan membayar pajak terutang, yaitu : t tabel $1,966 < t$ hitung sebesar 2,326 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,021 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa membayar pajak sendiri oleh wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nur Kamila Jilan Maulida (2010) dan Widayati (2010) yaitu kesadaran, kejujuran, dan hasrat wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan penghindaran pajak terutangnya. Damayanti (2004) menyebutkan bahwa fungsi pembayaran pajak terutang sebagian besar telah dilaksanakan tepat waktu. Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak tepat waktu ternyata fungsi penghitungan pajak terutang dilakukan oleh *Fiskus*.

d) H_4 : Pelaporan SPT oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhannya.

Hasil regresi menunjukkan melaporkan SPT, yaitu : t tabel $1,966 < t$ hitung sebesar 3,451 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,038 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaporan oleh wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nur Kamila Jilan Maulida (2010) yaitu ketepatan waktu pelaporan SPT yang disampaikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak agar terhindar dari denda sebagai bukti pelunasan pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Indra Kusumawati (2005) menyimpulkan bahwa pelaksanaan *self assessment* belum bisa diterapkan oleh Wajib pajak Orang Pribadi terutama pemilik kos-kosan, karena mereka sering kali tidak melaporkan atau mencantumkan Pajak Penghasilannya di SPT. Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak pemilik rumah kos-kosan karena rendahnya tingkat kejujuran Wajib Pajak dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan.

4.6 Koefisien Determinasi

Tabel IV.15 – Hasil Analisis Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.896 ^a	.794	.785	2.569

a. Predictors: (Constant), Melaporkan SPT, Menghitung Pajak Terutang, Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak, Membayar Pajak Terutang

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai *R Square* pada penelitian ini adalah 0.794 atau 79,4%. hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri pajak terutang, membayar pajak terutang, melaporkan pajak masa atau tahunan) terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sebesar 79,4% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri pajak terutang, membayar pajak terutang, melaporkan SPT) mampu menjelaskan sebesar 79,4% variasi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sedangkan sisanya sebesar 20,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan sebagai berikut :

- 1) Hasil regresi menunjukkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, yaitu : t tabel $1,966 < t$ hitung sebesar $4,456$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,000$ berada di bawah $0,05$. Hal ini mengandung arti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima dengan hasil mendaftarkan diri sebagai wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Hasil regresi menunjukkan menghitung pajak terutang, yaitu : t tabel $1,966 < t$ hitung sebesar $2,358$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,036$ berada di bawah $0,05$. Hal ini mengandung arti bahwa hipotesis kedua yang menyatakan menghitung pajak terutang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima dengan hasil menghitung pajak terutang memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Hasil regresi menunjukkan membayar pajak terutang, yaitu : t tabel $1,966 < t$ hitung sebesar $2,326$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,021$ berada di bawah $0,05$. Hal ini mengandung arti bahwa hipotesis ketiga

yang menyatakan membayar pajak terutang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima dengan hasil membayar pajak terutang memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 4) Hasil regresi menunjukkan melaporkan SPT, yaitu : $t \text{ tabel } 1,966 < t \text{ hitung } 3,451$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,038 berada di bawah 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa hipotesis keempat yang menyatakan melaporkan SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima dengan hasil melaporkan SPT memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Secara Simultan (Uji F), menunjukkan bahwa nilai $F \text{ tabel } 2,395 < F \text{ hitung } 10,232$ dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,000 berada dibawah 0,05. Maka model regresi menunjukkan bahwa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak hutang, dan melaporkan SPT secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

- 1) Kurangnya respon wajib pajak untuk menjawab kuesioner yang dititip apabila dibandingkan dengan menunggu responden untuk mengisi kuesioner secara langsung.
- 2) Wajib pajak hanya akan ramai berdatangan pada hari-hari terakhir penyampaian atau pelaporan SPT Masa ataupun Tahunan. Sedangkan pada

hari-hari biasanya wajib pajak sangat sedikit yang dapat dijumpai di KPP tersebut, sehingga menyebabkan kesulitan untuk menemui responden.

- 3) Penelitian hanya dilakukan pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sehingga hasil penelitian hanya mencerminkan mengenai kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Mengacu pada hasil penelitian dimana variabel *independent*, yaitu penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini merupakan indikator bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pelayanan, kebijakan, serta prosedur yang selama ini diterapkan dan ditetapkan. Hal ini dapat dijadikan konsep dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan maupun semua kebijakan fiskal.
- 2) Faktor lain di luar penerapan *Self Assessment System* yang perlu ditingkatkan guna menambah pandangan positif para wajib pajak sehingga dapat terlaksananya *voluntary compliance* yaitu kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya terdapat peningkatan kualitas, sosialisasi, profesionalisme dan kejujuran dari petugas pajak.

- 3) Guna mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang, maka pada penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel seperti pengaruh sosialisasi dan persepsi terhadap penerapan *Self Assessment System* atau pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap penerimaan.
- 4) Diharapkan terus terjadi peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pajak agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, sehingga wajib pajak memiliki persepsi atau *image* yang positif sehingga dapat terciptanya *voluntary compliance*. Karena berdasarkan penelitian yang penulis lakukan langsung di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan masih banyak ditemukan wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai wajib pajak. Contoh nyata yang terlihat adalah, masih banyak WP yang menyampaikan/melaporkan SPT Masa atau Tahunannya tidak tepat pada waktunya, bahkan pada hari-hari terakhir batas pelaporan, yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi WP tersebut karena menunggu antrian yang begitu banyak. Selain itu, aparat pajak hendaknya menambah intensitas penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat yang belum menjadi wajib pajak dan masyarakat yang telah menjadi wajib pajak mengenai cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, cara menghitung pajak terutang, membayar pajak dan mengisi SPT bagi masyarakat dan wajib pajak yang belum memahami.
- 5) Dengan berjalannya Sensus Pajak Nasional (SPN) untuk kesekian kalinya, diharapkan semakin meningkatnya kepatuhan seluruh wajib pajak, dan

memahami hak serta kewajibannya sebagai WP, dan semakin bertambahnya masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai WP untuk selanjutnya memiliki NPWP. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antara petugas SPN dan masyarakat ataupun wajib pajak untuk memberikan informasi dan data-data akurat yang ditanyakan oleh petugas SPN tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim Surat Al-Baqarah:177; Al-An'am:141; Al-Isra':26; An-Nisa':36.
- Andani, M. N. 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi.Semarang: Universitas Diponegoro.
- Catrinasari, R. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Perbankan Go Publis di Bursa Efek Jakarta (BEJ)*. Skripsi.Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Damayanti, T. 2004. *Pelaksanaan Self Assessment System Menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol. X No.1, 109-128.
- Diana Anastasia, S. A. 2009. *Perpajakan Indonesia, Konsep,Aplikasi, dan Pemungutan Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanannya*. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Dr.Waluyo, M. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Dwiana, I. 2010. *Pengaruh Kompleksitas Panjang Formulir SPT dan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Gunadi. 2005. *Pajak Internasional*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Handayani, S. 2007. *Pelaksanaan Self Assessment System dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Boyolali*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasan, I. 2003. *Pokok-pokok Materi Statistik 2*. PT. Bumi Aksara.
- Hermawan, Teguh N. 2010. *Pengaruh Persepsi Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Setia Budi Satu*. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi IV*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2008. 1013. Jakarta.

- Kusumawati, Indra. 2005. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System : Suatu Studi di Bangkalan*. Surabaya : Universitas Trunojoyo.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, Nur Kamila J. 2010. *Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Sidoarjo Barat*. Jawa Timur.
- Meryzha. 2011. *Pengaruh Diferensiasi Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Kartu Prabayar IM3 Di Kota Padang*. Padang.
- Muljono, D. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mustikasari, E. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. SNA X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007 . Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nurkholis. 2010. *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta.
- Prasetyono, D. S. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara dan Perhitungan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Laksana.
- Priyatno, Dwi, 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Penerbit MediaKom, Yogyakarta.
- Rachys. 2011. *Pengaruh Wisata Budaya Bakar Tongkang Terhadap Pendapatan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir*. Riau : Universitas Riau.
- Rahayu, Siti K. 2010. *Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta.
- Rambe, A. I. 2009. *Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP DKI Jakarta Khususnya Jakarta Pusat*. Jakarta.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Santoso, S. 2001. *Mengelola Data Statististik Secara Profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Santoso, W. 2008. *Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Keuangan Publik , 5 No.1, 85-137.
- Sekaran, U. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. (Vol. 4 Agustus). Bandung: JF Alfa Beta.

Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian Akuntansi Pendidikan*. PT. Raga Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widayati. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak*. Jakarta.

Zain, M. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Salemba Empat.

WEBSITE :

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/eakt/2007/jiunkpe-ns-s1-2007-32403090-8783-pajak_madiun-chapter2.pdf

<http://kedanta.tripod.com/karya.html>

<http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisi-pajak.html>

<http://duniabaca.com/definisi-pajak-menurut-para-ahli.html>

<http://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/>